



PERAN BADAN MUSYAWARAH KAMPUNG DI KAMPUNG TAGULIK DISTRIK BUGI KABUPATEN JAYAWIJAYA

Ahmad Rizali Pawane¹, Sahrail Robo², Dafrin Muksin³ Selpi Wosi⁴

1-4 Program Studi Ilmu Pemerintahan, Universitas Amal Ilmiah Yapis Wamena Papua, Indonesia

Email: rizali1608@gmail.com

<https://doi.org/10.61578/lapago.vol2.no2.art4>



Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC- BY-NC-SA 4.0)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Bamuskam Di Kampung Tagulik Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya. Adapun variabel dalam penelitian ini menggunakan variabel mandiri, yaitu peran Badan Musyawarah kampung (Bamuskam). Jenis penelitian menggunakan penelitian deskriptif dengan analisa persentase. Populasi sebanyak 14 orang aparat yang bertugas di Kantor Kampung Tagulik. Teknik sampling menggunakan sampling total, sehingga sampel diambil sebanyak 14 orang. Teknik analisa data yang digunakan adalah dengan menggunakan persentase. Skala pengukuran yang dipakai adalah Skala Likert. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Kampung Tagulik Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya yang dinilai dari indikator, yaitu menyalurkan aspirasi masyarakat, menetapkan aturan, dan pengawasan, berada pada predikat kurang sekali, yaitu hasil perolehan nilai sebesar 27,78%, untuk kategori selalu, 30,16% untuk kategori kadang-kadang, dan 42,06% untuk kategori tidak pernah.

Kata Kunci: *Peran Badan Musyawarah Kampung*



Abstract

This research aims to determine the role of Bamuskam in Tagulik Village, Bugi District, Jayawijaya Regency. The variables in this research use independent variables, namely the role of the Village Consultative Body (Bamuskam). This type of research uses descriptive research with percentage analysis. The population is 14 officers on duty at the Tagulik Village Office. The sampling technique used total sampling, so the sample was taken as many as 14 people. The data analysis technique used is percentages. The measurement scale used is the Likert Scale. Based on the results of the research, it can be concluded that the role of the Village Deliberative Body (Bamuskam) in Tagulik Village, Bugi District, Jayawijaya Regency, which is assessed from indicators, namely channeling community aspirations, setting rules and supervision, is at a very low level, namely the result of obtaining a score of 27.78 %, for the always category, 30.16% for the sometimes category, and 42.06% for the never category..

Keywords: *The role of the Village Consultative Body*



Pendahuluan

Sesuai dengan Amanat UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah dipandang perlu untuk menekankan pada prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) dan Pemerintahan yang bersih (*Clean Governance*) dalam mewujudkan pembangunan daerah yang desentralistik dan demokratis.

Dalam rangka pelaksanaan otonomi akan sangat bergantung pada kesiapan Pemerintah Daerah dalam menata sistem Pemerintahannya, agar tercipta pembangunan yang efektif, efisien, transparansi dan akuntabel serta mendapat partisipasi dari masyarakat dalam penyelenggaraan Pemerintahannya.

Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa kampung sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Kampung yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan dikantor absolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya.

Otonomi daerah telah memberikan ruang gerak bagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan, yang menjadikan masyarakat tidak hanya sebagai objek pembangunan tetapi juga subjek pembangunan dan dengan tingkat partisipasi tersebut diharapkan akselerasi hasil-hasil pembangunan dapat segera diwujudkan dan berdayaguna dalam peningkatan kualitas kehidupan masyarakat.

Ruang gerak bagi demokratisasi dan peran serta masyarakat tersebut dalam perjalanan belum berpihak secara sungguh-sungguh terhadap kepentingan masyarakat. disadari bersama bahwa mengubah suatu sistem sosial politik ekonomi serta kelembagaan dan budaya tidak dapat terjadi dalam waktu relatif singkat (berlakunya sebuah UU tidak berarti secara otomatis mengubah sistem, politik, dan budaya masyarakat). Diperlukan adanya konsistensi, kemauan baik dari pelaksanaan UU, Kebijakan Pemerintah, kesiapan dari masyarakat, dan birokrasi pemerintah serta lembaga swadaya masyarakat.

Dengan kata lain ide-ide tentang otonomi daerah, demokratisasi dan penghargaan atas hak-hak asasi manusia dalam pembangunan memiliki dinamika sendiri dalam implementasinya baik dipusat, daerah, dan desa. Paradigma pembangunan yang sentralistik terbukti telah gagal dan perlu dikembangkan paradigma baru yaitu paradigma pembangunan yang melibatkan peran serta masyarakat secara lebih luas melalui peningkatan *civil society* sehingga pembangunan adalah dari masyarakat oleh masyarakat dan untuk masyarakat yang pada akhirnya adalah Pembangunan Bangsa secara keseluruhan, dan itu hanya dapat terjadi apabila pembangunan dimulai dari “pembangunan masyarakat kampung”.

Saat ini, upaya untuk membangun dan mengembangkan kehidupan masyarakat desa dirasakan semakin penting. Hal ini disebabkan disamping karena sebagian besar penduduk tinggal di pedesaan, kini partisipasi masyarakat di dalam kegiatan pembangunan juga sangat diharapkan, sebagaimana tercantum dalam UU nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Otonomi daerah sangat mensyaratkan keadaan sumber daya manusia yang mumpuni, karena mereka inilah yang kelak akan lebih banyak menentukan bergerak atau tidaknya suatu daerah di dalam menjalankan kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya.



Daerah yang otonom sangat mensyaratkan keberadaan masyarakat yang otonom pula. Masyarakat yang otonom adalah masyarakat yang berdaya, yang antara lain ditandai dengan besarnya partisipasi mereka di dalam kegiatan pembangunan. Karena itulah, dalam era otonomi daerah yang kini mulai dilaksanakan, peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan dan pemerintahan pada umumnya sangat penting. Secara teoritis dalam pelaksanaan otonomi daerah terdapat sendi-sendi sebagai pilar penyangga otonomi, sendi-sendi tersebut meliputi: (1) *sharing of power* (pembagian kewenangan); (2) *distribution of income* (pembagian pendapatan); (3) *empowering* (kemandirian / pemberdayaan pemerintah daerah).

Ketiga sendi tersebut sangat berpengaruh dalam pelaksanaan otonomi daerah, apabila sendi tersebut semakin kuat, maka pelaksanaan otonomi daerah semakin kuat pula, dan sebaliknya apabila sendi-sendi tersebut lemah, maka pelaksanaan otonomi semakin lemah pula. Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara Kampung. Keberadaan Bamuskam dalam Pemerintahan Kampung adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan.

Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional.

Upaya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat daerah sebenarnya telah banyak dilakukan oleh pemerintah melalui berbagai program pembangunan, antara lain: Dana Pembangunan Desa, Bantuan Inpres Desa Tertinggal, bantuan bibit dan pupuk bagi petani, Kredit Usaha Tani, Kukesra, Takesra, bantuan bergulir ternak sapi dan lain sebagainya. Namun demikian berbagai program tersebut gagal memberikan kesejahteraan warga masyarakat di daerah (kampung).

Partisipasi masyarakat tersebut disamping dilaksanakan oleh lembaga-lembaga non formal seperti keterlibatan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), kelompok-kelompok kepentingan lain melalui tuntutan-tuntutan terhadap pemerintah atau bentuk penolakan terhadap kebijakan pemerintah, juga dilaksanakan oleh lembaga-lembaga formal pada tingkat daerah melalui kewenangan lebih besar pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan di tingkat kampung dengan pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)/Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam). Bamuskam merupakan wadah permusyawaratan/pemufakatan dari pemuka-pemuka masyarakat yang ada di desa/kampung dan di dalam mengambil keputusannya ditetapkan berdasarkan musyawarah dan mufakat dengan memperhatikan sungguh-sungguh kenyataan hidup yang berkembang dalam masyarakat yang bersangkutan.

Sehubungan dengan hal yang telah dikemukakan tersebut, permasalahan yang ada di Kampung Tagulik Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya, bahwa Bamuskam belum menunjukkan peran untuk memperhatikan kondisi kampung terutama di bidang pembangunan, seperti peran dalam menyalurkan aspirasi rakyat, upaya peningkatan perekonomian dan kesejahteraan rakyat serta pembangunan fisik. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian **“Peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) Di Kampung Tagulik Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya”**



Metode

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan Deskriptif, dengan jumlah Populasi sebanyak 14 dengan menggunakan metode *total sampling*. Dalam penelitian ini menggunakan Teknik analisis data Analisa deskriptif:

$$P = \frac{F}{n} \times 100\%$$

Keterangan :

P = Presentase

F = Frekuensi

n = Jumlah Sampel

100% = Nilai Tetap

Dalam menggunakan tehnik deskriptif memberi predikat pada satu variabel yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya, Pemberian predikat diukur dengan menggunakan persentase kemudian diinterpretasikan dengan kata-kata atau kalimat (kualitatif).

Adapun predikat tersebut adalah :

- a. Kategori Baik (76-100%)
- b. Kategori Cukup (56-75%)
- c. Kategori Kurang (40-55%)
- d. Kategori Kurang Sekali <40%

Hasil dan Pembahasan

Variabel Peran Badan Musyawarah kampung (Bamuskam):

1. Indikator Menyalurkan aspirasi masyarakat;

Hasil penelitian tentang indikator menyalurkan aspirasi masyarakat dari sebaran kuesioner diperoleh jawaban sebagai berikut:

Tanggapan responden tentang Bamuskam menampung aspirasi masyarakat

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	28,58
2	Kadang-kadang	5	35,71
3	Tidak pernah	5	35,71
	Jumlah	14	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Pada Tabel tersebut bahwa responden yang memberikan jawaban pada pilihan jawaban selalu sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 28,58%, pilihan jawaban kadang-kadang sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 35,71%, dan pilihan jawaban tidak pernah sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 35,71%. Pilihan jawaban yang terbanyak adalah pada pilihan jawaban kadang-kadang dan tidak pernah. Tanggapan responden tentang Bamuskam

menyampaikan atau meneruskan saran-saran dari masyarakat tentang pembangunan kepada pemerintah daerah, disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tanggapan Responden Tentang Bamuskam
Menyampaikan Atau Meneruskan Saran-Saran Dari
Masyarakat Tentang Pembangunan Kepada Pemerintah Daerah**

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	28,57
2	Kadang-kadang	6	42,86
3	Tidak pernah	4	28,57
	Jumlah	14	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Pada Tabel tersebut bahwa responden yang memberikan jawaban pada pilihan jawaban selalu sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 28,57%, pilihan jawaban kadang-kadang sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 42,86%, dan pilihan jawaban tidak pernah sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 28,57%. Pilihan jawaban yang terbanyak adalah pada pilihan jawaban kadang-kadang. Tanggapan responden tentang aspirasi yang disalurkan oleh Bamuskam ditindaklanjuti, disajikan pada tabel di bawah ini:

**Tanggapan responden tentang aspirasi yang disalurkan oleh Bamuskam
ditindaklanjuti**

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	5	35,71
2	Kadang-kadang	7	50
3	Tidak pernah	2	14,29
	Jumlah	14	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Pada Tabel tersebut bahwa responden yang memberikan jawaban pada pilihan jawaban selalu sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 35,71%, pilihan jawaban kadang-kadang sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 50%, dan pilihan jawaban tidak pernah sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 14, %29. Pilihan jawaban yang terbanyak adalah pada pilihan jawaban kadang-kadang.

2. Indikator menetapkan peraturan;

Hasil penelitian tentang indikator menetapkan peraturan dari sebaran kuesioner diperoleh jawaban sebagai berikut:

**Tanggapan Responden Tentang
Bamuskam Menjalankan Fungsinya Dalam Menetapkan
Peraturan Yang Berkaitan Dengan Kondisi Kampung**



No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	5	35,71
2	Kadang-kadang	4	28,58
3	Tidak pernah	5	35,71
	Jumlah	14	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah

Pada Tabel tersebut bahwa responden yang memberikan jawaban pada pilihan jawaban selalu sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 35,71%, pilihan jawaban kadang-kadang sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 28,57%, dan pilihan jawaban tidak pernah sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 35,71%. Pilihan jawaban yang terbanyak adalah pada pilihan jawaban selalu dan tidak pernah. Tanggapan responden tentang peraturan yang ditetapkan sesuai dengan keinginan masyarakat, disajikan pada tabel berikut:

Tanggapan Responden Tentang Peraturan Yang Ditetapkan Sesuai Dengan Keinginan Masyarakat

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	5	35,71
2	Kadang-kadang	3	21,43
3	Tidak pernah	6	42,86
	Jumlah	14	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Pada Tabel tersebut bahwa responden yang memberikan jawaban pada pilihan jawaban selalu sebanyak 5 orang dengan persentase sebesar 35,71%, pilihan jawaban kadang-kadang sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 21,43%, dan pilihan jawaban tidak pernah sebanyak 6 orang dengan persentase sebesar 42,86%. Pilihan jawaban yang terbanyak adalah pada pilihan jawaban tidak pernah. Tanggapan responden tentang peraturan yang sudah ada dilaksanakan dengan baik, disajikan pada tabel berikut:

Tanggapan Responden Tentang Peraturan Yang Sudah Ada Dilaksanakan Dengan Baik

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	3	21,43
2	Kadang-kadang	4	28,57
3	Tidak pernah	7	50
	Jumlah	14	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah

Pada Tabel tersebut bahwa responden yang memberikan jawaban pada pilihan jawaban selalu sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 21,43%, pilihan jawaban kadang-kadang sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 28,57%, dan pilihan jawaban tidak pernah sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 50%. Pilihan jawaban yang terbanyak adalah pada pilihan jawaban tidak pernah.

3. Indikator Pengawasan;

Tanggapan responden tentang indikator pengawasan, disajikan pada tabel berikut:

**Tanggapan Responden Tentang Bamuskam
Melakukan Fungsinya Sebagai Badan Yang Mengawasi
Jalannya Pembangunan Di Kampung**

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	3	21,43
2	Kadang-kadang	4	28,57
3	Tidak pernah	7	50
	Jumlah	14	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Pada Tabel tersebut bahwa responden yang memberikan jawaban pada pilihan jawaban selalu sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 21,43%, pilihan jawaban kadang-kadang sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 28,57%, dan pilihan jawaban tidak pernah sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 50%. Pilihan jawaban yang terbanyak adalah pada pilihan jawaban tidak pernah. Tanggapan responden tentang Bamuskam melakukan pengawasan juga terhadap pemerintahan distrik, disajikan pada tabel berikut:

**Tanggapan Responden Tentang Bamuskam
Melakukan Pengawasan Juga Terhadap
Pemerintahan Distrik**

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	2	14,28
2	Kadang-kadang	2	14,28
3	Tidak pernah	10	71,43
	Jumlah	14	100

Sumber : Data Primer Yang Diolah

Pada Tabel tersebut bahwa responden yang memberikan jawaban pada pilihan jawaban selalu sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 14,28%, pilihan jawaban kadang-kadang sebanyak 2 orang dengan persentase sebesar 14,28%, dan pilihan jawaban tidak pernah sebanyak 10 orang dengan persentase sebesar 71,43%. Pilihan jawaban yang terbanyak adalah pada pilihan jawaban tidak pernah. Tanggapan responden tentang Bamuskam melakukan pengawasan dengan baik, disajikan pada tabel berikut:

**Tanggapan Responden Tentang Bamuskam
Melakukan Pengawasan Dengan Baik**

No	Pilihan jawaban	Frekuensi	Persentase (%)
1	Selalu	4	28,57
2	Kadang-kadang	3	21,43
3	Tidak pernah	7	50
	Jumlah	14	100

Sumber: Data Primer Yang Diolah

Pada Tabel tersebut bahwa responden yang memberikan jawaban pada pilihan jawaban selalu sebanyak 4 orang dengan persentase sebesar 28,57%, pilihan jawaban kadang-kadang sebanyak 3 orang dengan persentase sebesar 21,43%, dan pilihan jawaban tidak pernah sebanyak 7 orang dengan persentase sebesar 50%. Pilihan jawaban yang terbanyak adalah pada pilihan jawaban tidak pernah.

Pembahasan

Peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di Kampung Tagulik Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya dari hasil penelitian, maka dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Indikator Menyalurkan Aspirasi Masyarakat;

Penilaian indikator menyalurkan aspirasi masyarakat disajikan pada tabel berikut:

**Persentase Nilai Rata-Rata Dari Inidikator
Menyalurkan Aspirasi Masyarakat**

No	Sub indikator	Kategori (%)		
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Bamuskam menampung aspirasi masyarakat	28,58	35,71	35,71
2	Bamuskam menyampaikan atau meneruskan saran-saran dari masyarakat tentang pembangunan kepada pemerintah daerah	28,57	42,86	28,57
3	aspirasi yang disalurkan oleh Bamuskam ditindaklanjuti	35,71	50	14,29
	Rata-rata (%)	30,95	42,86	26,19

Sumber : *Data Primer Diolah*

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa rata-rata nilai untuk kategori selalu adalah 30,95 persen, kategori kadang-kadang sebesar 42,86 persen dan kategori tidak pernah sebesar 26,19 persen. Nilai rata-rata terbesar adalah untuk kategori kadang-kadang, yaitu 42,86%. Sedangkan pada kategori selalu sebesar 30,95%. Nilai ini termasuk pada predikat kurang sekali. Dapat dijelaskan bahwa Bamuskam kurang menampung aspirasi masyarakat masalah pembangunan di kampung Tagulik, Bamuskam jarang meneruskan aspirasi yang disampaikan masyarakat untuk diteruskan kepada pihak pemerintah daerah, dan Bamuskam jarang juga menindaklanjuti apa yang telah diputuskan secara bersama-sama dengan masyarakat.

2. Indikator Menetapkan Peraturan;

Penilaian indikator menetapkan peraturan disajikan pada tabel berikut:

**Persentase nilai rata-rata dari indikator
Menetapkan peraturan**

No	Sub indikator	Kategori (%)		
		Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Bamuskam menjalankan fungsinya dalam menetapkan peraturan yang berkaitan dengan kondisi Kampung	35,71	28,58	35,71
2	peraturan yang ditetapkan sesuai dengan keinginan masyarakat	35,71	21,43	42,86
3	peraturan yang sudah ada dilaksanakan dengan baik	21,43	28,57	50
	Rata-rata (%)	30,95	26,19	42,86

Sumber: *Data Primer Diolah*

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa rata-rata nilai untuk kategori selalu adalah 30,95 persen, kategori kadang-kadang sebesar 26,19 persen dan kategori tidak pernah sebesar 42,86 persen. Nilai rata-rata terbesar adalah untuk kategori tidak pernah, yaitu 42,86%. Sedangkan pada kategori selalu sebesar 30,95%. Nilai ini termasuk pada predikat kurang sekali. Dapat dijelaskan bahwa Bamuskam belum menjalankan fungsi dengan baik dalam hal menetapkan peraturan-peraturan yang ada di kampung, bahkan juga belum seluruhnya membuat aturan-aturan, peraturan yang sudah ada, misalnya tentang musyawarah belum dilaksanakan dengan baik.

3. Indikator Pengawasan;

Penilaian indikator pengawasan disajikan pada tabel berikut disajikan pada tabel berikut :

**Persentase Nilai Rata-Rata Dari Indikator
Pengawasan**

No	Kategori (%)
----	--------------



	Sub indikator	Selalu	Kadang-kadang	Tidak pernah
1	Bamuskam melakukan pengawasan pembangunan di Kampung	21,43	28,57	50
2	Bamuskam melakukan pengawasan juga terhadap pemerintahan distrik	14,28	14,28	71,43
3	Bamuskam melakukan pengawasan dengan baik	28,57	21,43	50
	Rata-rata (%)	21,43	21,43	57,14

Sumber: *Data Primer Diolah*

Pada tabel tersebut di atas, terlihat bahwa rata-rata nilai untuk kategori selalu adalah 21,43 persen, kategori kadang-kadang sebesar 21,43 persen dan kategori tidak pernah sebesar 57,14 persen. Nilai rata-rata terbesar adalah untuk kategori tidak pernah, yaitu 57,14%. Sedangkan pada kategori selalu sebesar 21,43%. Nilai ini termasuk pada predikat kurang sekali. Dari data tersebut, dapat dijelaskan bahwa sebagian besar responden mengatakan bahwa Bamuskam kadang-kadang atau bahkan tidak melakukan pengawasan dengan baik jalannya pembangunan di Kampung Tagulik, dan Bamuskam kurang sekali menjalankan fungsinya sebagai Badan Musyawarah yang ada di tingkat kampung, hal ini disebabkan oleh pengurus-pengurus yang ada jarang melakukan komunikasi karena tidak berada di tempat, sehingga perannya kurang berjalan dengan baik. Berdasarkan pembahasan persentase nilai rata-rata (%) dari masing-masing indikator, maka selanjutnya akan dihitung persentase nilai rata-rata untuk menentukan predikat variabel Peran Bamuskam. Persentase nilai rata-rata (%) untuk variabel Peran Bamuskam, disajikan pada tabel berikut:

Persentase nilai rata-rata variabel Peran Bamuskam

No	Indikator	Kategori jawaban		
		Selalu	Kadang-kadang	tidak pernah
1	Menyalurkan aspirasi masyarakat	30,95	42,86	26,19
2	Menetapkan peraturan	30,95	26,19	42,86
3	Pengawasan	21,43	21,43	57,14
	Rata-rata (%)	27,78	30,16	42,06

Sumber : *Data Primer Olahan*

Berdasarkan tabel tersebut di atas, rata-rata responden yang memberikan jawaban pada kategori selalu sebesar 27,78 persen, jawaban pada kategori kadang-kadang sebesar 30,16 persen, dan jawaban pada kategori tidak pernah adalah sebesar 42,06



persen. Dari hasil tersebut menunjukkan bahwa peran Badan Musyawarah Kampung (Bamuskam) di kampung Tagulik Distrik Bugi Kabupaten Jayawijaya di predikatkan kurang sekali, yaitu sebesar 27,78%.

Kesimpulan

Dari hasil penelitian ini, Dapat menarik kesimpulan dari hasil penelitian dan pembahasan diatas, melalui pertanyaan dengan fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Talambo Distrik Talambo Kabupaten Yahukimo. Adapun kesimpulan sebagai berikut :

1. Fungsi BPD yang dilihat dari kinerja dan mitra kerja adalah masih termasuk dalam kategori kurang
2. Penyelenggaraan pemerintahan yang dilihat dari indikator fungsi pengawasan, fungsi legislasi dan fungsi aspirasi adalah termasuk dalam kategori cukup.

A. Saran

Beberapa permasalahan yang perlu memperoleh perhatian dan penanganan secara berkesinambungan, diantaranya adalah:

1. Fungsi BPD perlu diperhatikan dengan baik dan kinerjanya perlu ditingkatkan;
2. BPD perlu melakukan mitra kerja yang lebih ditingkatkan guna memperoleh aspirasi masyarakat dalam pembangunan.

Daftar Pustaka

- Arikunto, Suharsimi. 2002, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* Rineka Cipta. Jakarta.
- HAW. Widjaja, 2007. *Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia* (Dalam Rangka Sosialisasi UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah), PT. Grafindo Persada. Jakarta
- Moleong, Lexy. J. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Prawirosentono, S, 1999, *Manajemen Sumber Daya Manusia Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPFE, Yogyakarta
- Rachman, Maman. 1999. *Strategi dan Langkah-Langkah Penelitian*. Semarang: IKIP Semarang Press.
- _____. 2008. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, bulat dan Utuh*. Rajawali Pers. Jakarta
- Sadu Wasistiono, Ismail Nurdin, M. Fahrurrozi, 2004. Perkembangan Organisasi Kecamatan Dari Masa ke Masa
- Sugiyono, 2008, *Metode penelitian Administrasi*, Alfa Beta Jakarta;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*.